

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 7 Oktober 2023, konflik Israel-Palestina kembali memanaskan akibat serangan yang dilancarkan oleh kelompok bersenjata Hamas ke Israel, yang tepatnya di seberang perbatasan Jalur Gaza. Serangan roket yang dilancarkan Hamas menyerbu komunitas Israel Selatan, menyebabkan lebih dari 1.300 orang tewas dan ratusan orang disandera. Peristiwa ini melahirkan pernyataan resmi dari Kabinet Israel mengenai deklarasi Perang terhadap Hamas (Council on Foreign Relations, 2025). Tentara Israel atau *Israel Defense Force* (IDF) memulai pengeboman dan menjadikan pengepungan yang telah diterapkan selama 16 tahun berubah menjadi blokade total. Operasi militer besar-besaran oleh IDF terus dilakukan, menjadikan konflik ini sebagai konflik terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

Pasalnya, penargetan warga sipil, penyerangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, serta blokade bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran dalam hukum internasional. Perbuatan yang dilakukan oleh IDF tidak mendapat penyelidikan secara efektif dan transparan oleh Otoritas Israel, menjadikan hal ini sebagai kejahatan perang dan genosida di Gaza (Amnesty International, 2024). Kondisi yang terjadi di Palestina memunculkan empati publik dan menjadi sorotan dunia Global. Organisasi internasional bersama dengan negara-negara telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan perdamaian, namun seringkali terhalang oleh ketidakseimbangan

kekuatan struktural (Akram, 2024). Seiring dengan beragamnya respons global, masyarakat internasional juga turut menyuarakan dukungan kepada Palestina melalui gerakan sosial dan membentuk lembaga advokasi.

Salah satu contoh masyarakat internasional yang berperan aktif dalam mendukung pemenuhan hak-hak Palestina adalah masyarakat Irlandia. Irlandia merupakan negara anggota Uni Eropa pertama yang mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan menyerukan pendirian negara Palestina di tahun 1980. Seruan ini berkaitan dengan Irlandia yang mempunyai kesamaan historis, dimana Irlandia pernah mengalami masa kolonialsime dan penindasan oleh Inggris. Persoalan masa lalu ini yang kemudian membawa masyarakat Irlandia berupaya menjadi garis depan dalam mendukung Palestina melalui aksi-aksinya. Masyarakat Irlandia memandang perjuangan rakyat Palestina sebagai perjuangan untuk kemanusiaan akibat pendudukan apartheid, pembersihan etnis, dan pembunuhan (Bicer, 2023). Komitmen masyarakat Irlandia untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Palestina melahirkan pembentukan lembaga advokasi Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC).

Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC) merupakan organisasi yang lahir untuk menggerakkan partisipasi masyarakat Irlandia dalam memperjuangkan hak asasi manusia semua masyarakat Palestina, termasuk hak-hak sipil dan politik. Pada dasarnya organisasi ini didirikan pada tahun 2001 oleh masyarakat Irlandia termasuk aktivis hak asasi manusia, akademisi, serikat buruh, jurnalis dan masyarakat Palestina yang bertempat tinggal di Irlandia (IPSC, n.d.). Namun, setelah eskalasi konflik pada

2023, komitmen masyarakat Irlandia terhadap isu Palestina semakin signifikan. Terlihat pada Oktober 2023, IPSC mampu memobilisasi ribuan masyarakat Irlandia untuk melakukan aksi guna mendukung rakyat Palestina serta mengecam perbuatan militer Israel (Burns, 2023). IPSC sendiri merupakan organisasi independen, sehingga dalam aksinya IPSC mengandalkan kontribusi relawan yang memiliki komitmen sama dalam mencapai kebebasan bagi rakyat Palestina.

IPSC melakukan mobilisasi akar rumput untuk menyuarakan kebebasan bagi masyarakat Palestina serta menumbuhkan pemahaman publik mengenai rezim apartheid dan genosida oleh pemerintah Israel. Selain itu, organisasi ini juga turut mempropagandakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) sebagai upaya memutuskan keterlibatan negara, lembaga, serta bisnis Irlandia dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel (IPSC, n.d.). Dengan konflik yang masih terus terjadi dan semakin bertambahnya korban, IPSC memperlihatkan komitmennya dalam menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Palestina. Gerakan yang dilakukan IPSC ini pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah Irlandia dalam merespons tindakan genosida di Palestina.

Advokasi kebijakan luar negeri Irlandia yang dilakukan oleh IPSC merupakan upaya untuk memastikan isu Palestina tidak berhenti pada tingkatan solidaritas publik, namun masuk dalam proses pengambilan keputusan negara. Meskipun Irlandia tidak memiliki keterlibatan langsung dalam konflik Israel-Palestina, posisi Irlandia sebagai bagian dari Uni Eropa dan forum multilateral merupakan posisi strategis di politik internasional (Department of Foreign Affairs and Trade Ireland, n.d.). Melalui

kebijakan luar negeri, Irlandia dapat menentukan sikap diplomatik, memberikan tekanan politik, serta berkontribusi dalam kebijakan kolektif yang berdampak pada konflik Israel-Palestina. Oleh karena itu, IPSC melakukan gerakan solidaritas sebagai upaya dalam memanfaatkan posisi tersebut guna mendapatkan pengaruh politik yang lebih luas. Sebagai aktor akar rumput, IPSC tidak memiliki kewenangan formal, sehingga pengaruhnya bergantung pada kapabilitas organisasi dalam mendorong pemerintah mengadopsi kebijakan resmi terkait konflik ini.

Dalam aksinya, IPSC menciptakan tekanan domestik melalui kampanye, mobilisasi publik, dan penyebaran informasi mengenai konflik Israel-Palestina. Upaya yang dilakukan IPSC di ruang publik menjadikan isu ini sebagai suatu hal yang tidak mudah diabaikan oleh pemerintah. Untuk memperkuat legitimasi tuntutananya, advokasi IPSC tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain seperti penyesuaian terhadap komitmen Uni Eropa dalam perlindungan hak asasi manusia (General Secretariat of the European Council and Council of the EU, n.d.). Selain itu, dukungan dari aktor politik domestik Irlandia seperti senator, dan tekanan dari organisasi global seperti Amnesty International turut meningkatkan peluang isu ini masuk dalam agenda kebijakan (Amnesty International Ireland, n.d.). Dengan demikian, IPSC dapat dipahami sebagai aktor yang mengartikulasi dan menguatkan tekanan tersebut, meskipun dalam aksinya tetap bergantung pada interaksi dengan faktor struktural dan domestik lainnya.

Melihat adanya hal tersebut, penulis berupaya melakukan analisis terhadap upaya IPSC selama eskalasi konflik dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan

luar negeri Irlandia terhadap konflik Israel-Palestina. Dengan menggunakan kerangka *Transnational Advocacy Network* (TAN), penulis memberikan analisis terkait mekanisme IPSC berdasarkan *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya TAN dimaksudkan untuk menggalang dukungan dan membuka akses ke sistem internasional dalam menghadapi hambatan atas kebijakan domestik negara. Fenomena TAN ini mulai diperbincangkan sejak berakhirnya Perang Dingin, ketika lembaga masyarakat sipil berhasil memengaruhi kebijakan internasional seperti pada Bank Dunia dan Konvensi Ottawa (Pallas & Bloodgood, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan, TAN membedah jaringan yang terlibat dan strategi yang digunakan oleh lembaga domestik seperti IPSC dalam memperoleh pengaruh dari luar.

Untuk mengadvokasi kebijakan luar negeri Irlandia, IPSC tidak cukup hanya mengandalkan mobilisasi domestik, melainkan membutuhkan keterlibatan jaringan advokasi transnasional dengan melibatkan aktor-aktor asing. Kebutuhan ini muncul karena akses terhadap pembuat kebijakan dan arena internasional tidak sepenuhnya terbuka bagi aktor *grassroots* seperti IPSC. Melalui TAN, IPSC dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat dengan mengaitkan advokasinya pada standar dan laporan internasional, serta memperluas jangkauan tekanan yang tidak bisa dihasilkan secara domestik. Keterlibatan organisasi seperti Amnesty International memungkinkan isu yang diangkat IPSC tidak dipandang sebagai kepentingan kelompok tertentu, tetapi sebagai bagian dari perhatian global terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, TAN membuka ruang bagi mekanisme *boomerang pattern*, di mana tekanan dari

aktor internasional dapat kembali memengaruhi pemerintah suatu negara melalui jalur eksternal (Keck & Sikkink, 2014).

Tujuan akhir advokasi IPSC dibingkai sebagai upaya mendorong adanya kebijakan luar negeri Irlandia yang semakin berpihak pada isu Palestina. Meskipun memiliki berbagai agenda, inti dari advokasi IPSC yakni menghasilkan tekanan politik yang mendukung pemerintah mengadopsi posisi yang konsisten dalam menegakkan hak asasi manusia di Palestina. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat ada atau tidaknya perubahan kebijakan, tetapi juga menilai konsistensi posisi Irlandia yang pro-Palestina. Posisi ini dapat diamati melalui kecenderungan posisi Irlandia pada pernyataan resmi, sikap diplomatik, dan keterlibatannya dalam forum internasional selama beberapa tahun terakhir. Salah satu bentuk komitmen Irlandia dalam mengadopsi kebijakan pro-Palestina adalah menguatnya pembahasan *Occupied Territories Bill* pada 2025 yang sebelumnya tidak dilanjutkan sejak 2018 (Oireachtas, 2025).

Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai Ireland Palestine Solidarity Campaign dan kelompok serupa dengan kerangka analisis TAN. Penelitian pertama yakni jurnal yang ditulis oleh Fiani Nurmallasari dengan judul “Peran Ireland Palestine Solidarity Campaign Terhadap Kebijakan Larangan Impor Produk Israel Tahun 2018”. Penelitian tersebut memaparkan kontribusi IPSC sebagai organisasi masyarakat sipil terhadap pemberlakuan RUU larangan impor Irlandia tahun 2018, dengan menggunakan pendekatan *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang berfokus pada *leverage politics* dan *accountability politics*. Fianni menyoroti IPSC

yang memiliki dampak cukup signifikan terhadap masyarakat maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan, terutama dalam boikot produk Israel dan pengesahan RUU Impor Produk Israel 2018 (Nurmalasari & Susilowati, 2021). Terdapat perbedaan fokus pada penelitian yang penulis lakukan, penulis berfokus pada strategi IPSC dalam melakukan advokasi kebijakan luar negeri terhadap Pemerintah Irlandia selama eskalasi konflik Palestina, mulai tahun 2023 hingga 2025. Kemudian dalam pembahasannya, penulis menggunakan semua indikator yang terdapat dalam kerangka teori TAN meliputi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Ghea Azzura Adhy Pramesvari, yakni “Strategi advokasi transnasional *Palestine Solidarity Campaign* (PSC) terhadap pemerintah United Kingdom dalam isu gencatan senjata di Gaza tahun 2023-2024”. Dengan menggunakan pendekatan *Transnational Advocacy Network* (TAN) dan menunjukkan adanya pola boomerang, penelitian ini menjawab strategi advokasi transnasional oleh PSC dalam memberikan desakan untuk menyuarakan gencatan senjata di Gaza atas konflik yang telah berlangsung selama satu tahun (Pramesvari, 2025). Dalam penelitian yang dilakukan terdapat pemilihan studi kasus yang berbeda, Ghea menggunakan PSC di Inggris Raya sebagai unit analisis, dan berfokus pada strategi PSC dalam menyuarakan gencatan senjata di Gaza tahun 2023-2024. Sedangkan penulis menggunakan IPSC di Irlandia sebagai unit analisis, dengan fokus strategi IPSC dalam advokasi kebijakan luar negeri Irlandia terkait konflik Israel-Palestina tahun 2023-2025.

Kemudian, terdapat penelitian yang ditulis Gabrielle Monalisa Zaziwe Metaniari Kabei dengan judul “Strategi Gerakan Internasional #MeToo dalam Mengatasi Diskriminasi terhadap Perempuan di Irlandia Tahun 2017 – 2020” yang menggunakan pendekatan *Transnasional Advocacy Network* (TAN) dan feminisme. Penelitian ini membahas gerakan sosial internasional #MeToo sebagai aksi, edukasi, dan advokasi dalam memperluas perspektif masyarakat Irlandia mengenai isu diskriminasi terhadap perempuan, serta mendorong kelompok feminis untuk memperoleh hak-haknya yang kemudian ditegaskan dalam perubahan hukum (Kabei, 2023). Penelitian yang dilakukan sama-sama menyoroti TAN di Irlandia, namun studi kasus yang dipilih berbeda. Dalam implementasinya, penulis menggunakan IPSC yang merupakan organisasi masyarakat sipil dengan fokus mendukung isu-isu Palestina, sedangkan Gabrielle menggunakan #MeToo yang merupakan gerakan sosial internasional dengan fokus isu diskriminasi terhadap perempuan di Irlandia.

Berdasarkan beberapa literature review yang telah diuraikan, penulis melihat bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai IPSC pada masa eskalasi konflik yang terjadi di tahun 2023. Meskipun terdapat berbagai penelitian yang berfokus pada peran *Transnational Advocacy Network* dalam mendorong perubahan kebijakan suatu negara, namun peran lembaga masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan luar negeri merupakan hal baru dalam kajian hubungan internasional. Dengan hadirnya lembaga masyarakat sipil seperti IPSC sebagai aktor non-negara dalam membentuk tekanan atau masukan bagi pemerintah, memungkinkan negara yang pada awalnya merumuskan kebijakannya sendiri lebih mempertimbangkan faktor

lain yang muncul dari luar kursi kekuasaan. Penelitian ini mampu mengisi kekosongan penelitian dengan memperlihatkan peran aktor non-negara dalam menerjemahkan tekanan normatif internasional ke dalam dinamika pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di tingkat domestik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana strategi *Transnational Advocacy Network* Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC) dalam advokasi Kebijakan Luar Negeri Irlandia terkait konflik Israel-Palestina Tahun 2023-2025”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari ditulisnya penelitian ini adalah sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari ditulisnya penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi advokasi Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC) selama eskalasi konflik melalui perspektif *Transnational Advocacy Network*. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memahami strategi IPSC dalam melakukan mobilisasi masyarakat di Irlandia dan

advokasi kebijakan luar negeri Irlandia terkait konflik Israel-Palestina pada Tahun 2023 - 2025.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Transnational Advocacy Network (TAN)*

Jaringan advokasi mempunyai dampak yang kuat secara domestik maupun transnasional, dengan menciptakan interaksi baru bersama aktor negara dan non-negara untuk membuka akses ke tatanan internasional. Dalam permasalahan seperti lingkungan hidup dan hak asasi manusia, jaringan advokasi memberikan ketersediaan sumber daya internasional kepada aktor-aktor lokal yang berjuang dalam politik dan sosial negaranya. Jaringan advokasi memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun negara untuk mengakses sistem internasional dan mendorong perubahan praktik kedaulatan nasional, dengan mengaburkan garis antara hubungan negara dengan masyarakatnya sendiri. Jaringan advokasi transnasional atau *Transnational Advocacy Network (TAN)* memiliki kapabilitas untuk melakukan mobilisasi informasi secara optimal dengan kolaborasi aktor-aktor internasional yang bergerak dalam isu yang sama. Hal ini dilakukan untuk mengangkat suatu persoalan serta melahirkan kategori baru melalui aktor non-negara, untuk mendapatkan kepercayaan dan pengaruh dari organisasi atau pemerintah yang berkekuatan besar.

TAN juga dapat ditafsirkan sebagai ruang politik yang di dalamnya terdapat proses negosiasi melalui cara formal maupun non formal, antar aktor yang memiliki posisi dan kepentingan berbeda. Hal ini dilakukan untuk menentukan makna sosial,

budaya, dan politik yang sedang diupayakan dan sebagai langkah dalam mendorong perubahan sikap dari negara-negara serta organisasi internasional. Dalam aksinya, terdapat berbagai aktor fundamental yang berperan TAN, antara lain adalah lembaga riset dan advokasi non-profit pada level domestik dan internasional, aksi sosial domestik, yayasan, media, gereja, serikat buruh, lembaga konsumen, para intelektual, bagian dari organisasi organisasi antar instansi di tingkat kawasan maupun internasional, serta bagian dari biro eksekutif maupun legislatif pemerintah. Kelompok-kelompok ini biasanya mengawali aksi dan memberikan tekanan kepada aktor-aktor yang berkuasa untuk mengambil sikap, juga mempropagandakan gagasan baru, menyajikan informasi, dan melobi pemerintah guna memengaruhi suatu kebijakan. Strategi TAN yang digunakan dalam upaya membujuk, mensosialisasikan, dan memberikan tekanan meliputi empat indikator.

Indikator pertama adalah politik informasi atau *information politics*, di mana aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan ini memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi akurat dalam waktu singkat, yang kemudian disebarluaskan ke tempat-tempat dengan pengaruh besar untuk dimanfaatkan secara politik. Dengan memanfaatkan media sebagai mitra esensial, informasi ini dikemas ulang dan ditafsirkan dengan bahasa yang dramatis untuk memunculkan kekhawatiran serta menjadi dasar kampanye mereka. Hal penting dalam pelaksanaan politik informasi yakni membingkai suatu isu termasuk dalam permasalahan teknis yang memerlukan penanganan pakar atau sebagai isu publik yang melibatkan kepentingan global yang lebih luas. Aktor-aktor dalam jaringan ini menjadi sumber informasi alternatif dengan

menyajikan fakta serta kesaksian dari individu yang hidupnya terdampak untuk mendapatkan kekuatan. Selain itu, aktivis membuat koneksi dengan kelompok domestik maupun kelompok luar negeri serupa guna mendapatkan akses ke data yang dibutuhkan untuk kepentingan kelompok, memperkuat legitimasi, serta mengumpulkan informasi mengenai target kebijakan tertentu.

Kemudian, politik simbolik atau *symbolic politics* menjadi salah satu indikator yang dalam praktiknya menggunakan simbol yang bersifat representatif, tindakan atau aksi, maupun cerita untuk menjelaskan terjadinya suatu permasalahan untuk mencapai audiens luas. Untuk menumbuhkan kesadaran serta memperluas kelompok pendukungnya, jaringan ini menggunakan cara persuasif dengan interpretasi simbolis. Aktor dalam TAN menyoroti dan menyampaikan pemahaman mengenai isu-isu yang memiliki simbolis kuat untuk memicu perkembangan jaringan. Aktivis menafsirkan makna tersembunyi penggunaan simbol dalam membawakan berbagai isu, guna mengubah pemahaman audiens mengenai peristiwa yang terjadi. Dalam politik simbolik, perpaduan peristiwa yang berbeda sering digunakan untuk mendorong publik dalam mengubah pikiran dan mengambil tindakan.

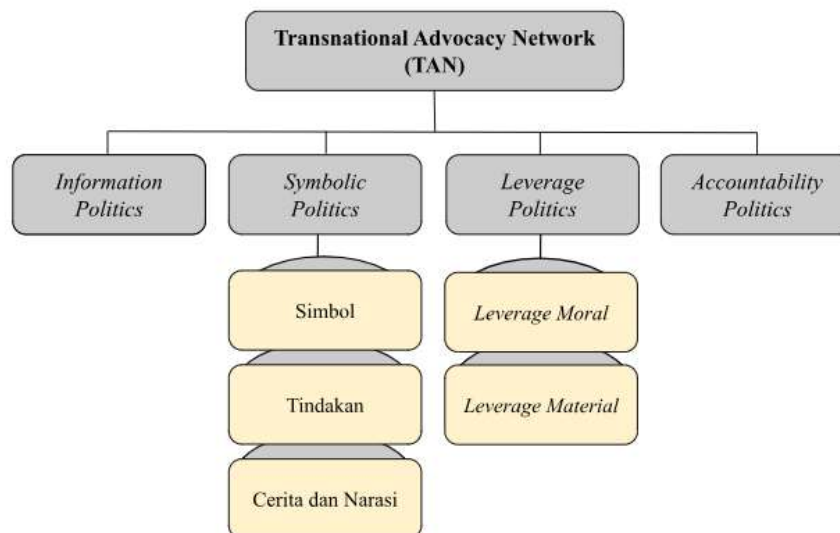
Indikator selanjutnya adalah politik pengaruh atau *leverage politics*, yakni kemampuan dalam memanfaatkan aktor berkuasa untuk memberikan pengaruh atau tekanan terhadap suatu peristiwa. Setelah memperkuat visi atau kepentingannya dalam menegosiasikan sebuah isu dengan politik informasi dan politik simbolis, aktivis memanfaatkan aktor berkuasa untuk menekan pemerintah atau aktor target dengan sesuatu yang bernilai seperti uang, perdagangan, serta kedudukan atau disebut sebagai

leverage material. Selain dengan material, aktivis menggunakan *leverage moral* sebagai langkah untuk menekan pemerintah dengan memanfaatkan reputasi moral serta menyoroti pelanggaran atas komitmen dan kewajiban internasional. Dalam TAN, aktivis berorientasi pada efektivitas yang meliputi reformasi kebijakan oleh aktor sasaran seperti pemerintah, lembaga keuangan internasional, atau aktor swasta sehingga memerlukan politik pengaruh. Aktivis berupaya untuk memengaruhi sikap yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah dengan menggunakan kekuasaan lembaga-lembaga besar sehingga kelompok lemah mampu mendapatkan pengaruh yang melebihi kapabilitas yang dimiliki.

Selain itu, politik akuntabilitas atau *accountability politics* berperan dalam mengupayakan kepatuhan aktor target dalam kebijakan atau komitmen yang sebelumnya telah dinyatakan oleh pihaknya. TAN mengupayakan berbagai langkah guna mendorong aktor negara dan aktor lain menyatakan sikap secara terbuka dalam mendukung peristiwa tertentu, walaupun perubahan sikap yang dilakukan oleh aktor target kerap dipandang sebagai pengalihan fokus publik. Aktivis jaringan melihat pernyataan sikap tersebut sebagai peluang untuk menuntut pertanggungjawaban, dengan melihat kesesuaian antara retorika pemerintah atau institusi dengan tindakan yang dilakukan. Untuk memastikan kepatuhan aktor negara dan aktor non-negara atas komitmen, norma, hukum atau kontrak yang telah dibuat, setiap negara mempunyai mekanisme yang bervariasi, sekalipun bagi negara yang sama-sama menganut sistem demokrasi.

Aktivis dalam TAN terhubung dengan nilai normatif bersama, kerangka pemikiran yang serupa, dan arus informasi yang intensif sehingga memperkuat jaringan ini dalam menciptakan ruang bagi isu baru di dunia internasional. TAN kerap menuntun kelompok kepentingan domestik melewati negara dan menjalin kerjasama dengan mitra internasional sebagai upaya memberikan desakan dari luar kepada negaranya. Hal ini disebut sebagai pola pengaruh boomerang, dimana kontak internasional mampu memperkuat persoalan yang menjadi tuntutan, menciptakan ruang diskusi baru, yang pada akhirnya dipantulkan kembali ke ranah domestik (Keck & Sikkink, 2014). Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* yang merupakan indikator dari TAN untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.5 Bagan Sintesa Pemikiran
Sumber: Diolah penulis dari Keck & Sikkink, 2014

Ditinjau dari latar belakang hingga kerangka pemikiran yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis membentuk sintesa pemikiran seperti pada gambar tersebut. *Transnational Advocacy Network* (TAN) beranggapan bahwa *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* merupakan strategi kolektif dalam melakukan advokasi atas suatu isu yang diperjuangkan secara normatif. *Information politics* dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai isu melalui jaringan atau koneksi dengan aktor lain, yang kemudian dikemas dan disebarkan kembali untuk melahirkan kekhawatiran sebagai dasar kampanye. Kemudian, *symbolic politics* berarti aktivitas interpretasi simbolis menggunakan simbol, tindakan, maupun narasi mengenai terjadinya suatu isu untuk memperluas jaringan pendukung. Sedangkan *leverage politics* yaitu upaya memanfaatkan aktor berkuasa, baik secara moral maupun material guna meningkatkan kapabilitas jaringan dalam menekan aktor target. Selain itu, *accountability politics* berguna untuk mendorong aktor target dalam pertanggungjawaban atas komitmen terkait isu sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Keempat indikator tersebut saling terhubung dan menjadi dasar TAN dalam memperjuangkan faktor, prinsip, nilai dan norma guna memberikan tekanan kepada aktor target untuk menerapkan sebuah kebijakan, serta melakukan monitor terhadap pemenuhan standar internasional.

1.6 Argumen Utama

Studi kasus Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC) menunjukkan bagaimana TAN bekerja melalui mekanisme persuasif dalam memengaruhi kebijakan

luar negeri Irlandia. IPSC sebagai *grassroots* memanfaatkan *information politics* dengan menyalurkan informasi dari aktor transnasional, seperti Amnesty International, BDS Palestina dan Addameer ke publik melalui publikasi di media sosial, laman IPSC, *The Irish Time*, maupun melalui ceramah publik, sehingga membingkai perlakuan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional. Informasi ini diterjemahkan ke dalam *symbolic politics* menggunakan simbol visual, ekspresi budaya, petisi, mobilisasi massa menggunakan atribut Palestina, dan penggunaan narasi poster maupun media sosial seperti hashtag #FreePalestine, #BDS, #SanctionNow, #EndIsraeliApartheid, #EndIsraeliImpunity, dan #GazaGenocide, serta bahasa moral yang resonan seperti sejarah penjajahan Inggris di Irlandia. Selanjutnya, IPSC mengaktifkan *leverage politics* dengan memanfaatkan aktor berkuasa termasuk Senator Independen, Parlemen Irlandia dan Bank Sentral Irlandia guna memberikan tekanan moral maupun material bagi pemerintah yang mempertahankan status quonya. Sejak tahun 2023, Irlandia secara bertahap menunjukkan *accountability politics* melalui dukungan gencatan senjata di PBB, pengakuan resmi kemerdekaan Palestina pada Mei 2024 yang berdampak pada penutupan Kedutaan Besar Israel di Irlandia pada Desember 2024, serta intervensi terkait Konvensi Genosida di ICJ pada Januari 2025. Selain itu, RUU *Occupied Territories Bill* 2018 memasuki tahap komite di parlemen, yang berarti RUU ini diperiksa bagian demi bagian dan memungkinkan adanya amandemen pada 2025, RUU ini mengalami kemajuan setelah terakhir diproses pada 2018. Sementara tekanan atas keterlibatan finansial terkait obligasi Israel memperluas akuntabilitas dari ranah diplomatik ke kebijakan legislatif dan keuangan. Kasus IPSC memperlihatkan bahwa

dalam konteks negara dengan struktur politik terbuka, TAN mampu mengubah isu normatif menjadi agenda kebijakan luar negeri yang diperdebatkan secara institusional.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi *Transnational Advocacy Network* dari Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC). Penelitian kualitatif merupakan sebuah jenis pendekatan penelitian yang didasarkan pada peristiwa atau gejala yang memiliki sifat natural. Pendekatan kualitatif tidak hanya melihat suatu masalah untuk digeneralisasikan, namun berfokus untuk melakukan analisis komprehensif mengenai suatu masalah secara utuh dan menyeluruh (Abdussamad, 2021). Penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran, penjelasan, dan analisis mendalam mengenai bagaimana strategi TAN diterapkan dalam IPSC dan menjadi salah satu faktor yang mendorong respons politik pemerintahan Irlandia terhadap peperangan yang terus terjadi. Penggunaan tipe penelitian kualitatif deskriptif mampu memberikan analisis komprehensif terkait bentuk program kerja dan kegiatan apa saja yang dilakukan IPSC dalam melakukan mobilisasi aksi dan memberikan tekanan politik domestik kepada pemerintah Irlandia. Tipe pendekatan ini menjadi suatu metode atau skema yang digunakan penulis dalam penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan penelitian terdapat pembatasan masalah yang digunakan untuk menentukan fokus pembahasan. Pembatasan masalah menjadi langkah penting untuk menghindari banyaknya hambatan dan tantangan akibat kajian yang terlalu luas (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah terdapat pada pokok bahasan strategi TAN di IPSC dalam mendorong respons pemerintah Irlandia terhadap permasalahan di Palestina. Kemudian dalam melakukan analisis permasalahan tersebut, penulis memilih jangkauan tahun 2023 hingga 2025. Jangkauan ini dipilih karena pada tahun 2023 terjadi eskalasi konflik pasca serangan dari Hamas, yang kemudian menjadikan isu Israel-Palestina ini mendapat banyak sorotan dari masyarakat internasional. Selain itu, tahun 2025 dipilih karena ketegangan masih berlangsung hingga saat ini dan mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa di Palestina. Tahun 2023 sampai dengan 2025 dipilih untuk mempermudah penulis dalam melakukan analisis dengan menggunakan data-data terbaru dan aktual.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur. Data sekunder yang dimaksudkan adalah data yang pengumpulannya tidak dilakukan secara langsung oleh penulis, melainkan didapat melalui perantara seperti dokumen-dokumen atau melalui orang ketiga (Abdussamad, 2021). Penelitian ini disusun menggunakan data-data yang bersumber dari media-media online yang kredibel, berita, website, laporan resmi organisasi

maupun pemerintah, karya tulis ilmiah, dan buku yang sesuai dengan pembahasan topik penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dikaji dan dianalisis secara mendalam untuk dijadikan dasar bagi penulis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Literatur tersebut berperan sebagai data pendukung dalam penelitian sehingga temuan dapat divalidasi kebenarannya.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Teknik ini bersifat induktif, di mana analisis dilakukan sesuai dengan temuan yang didapatkan dan kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, atau singkatnya menggunakan pola khusus-umum (Abdussamad, 2021). Dalam penerapannya, penulis melakukan analisis dengan melihat peristiwa atau aktivitas yang dilakukan IPSC dan setelahnya dikaji menggunakan teori yang dipakai, yakni *Transnational Advocacy Network* (TAN). Teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan reduksi data, dimana penulis memilih dan menyaring data yang sejalan dengan fokus penelitian. Setelah reduksi data selesai, penyajian data dilakukan dengan menguraikan data perihwal langkah apa saja yang mungkin berperan dalam advokasi IPSC di Irlandia sejak tahun 2023. Penulis kemudian menarik kesimpulan dengan melakukan analisis komprehensif dan memahami bagaimana IPSC menunjukkan komitmennya dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan luar negeri Irlandia mengenai konflik Israel-Palestina tahun 2023-2025.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki kontribusi penting dalam sebuah penelitian untuk memandu tulisan menjadi terstruktur. Hal ini juga membantu penulis dalam membuat penelitian untuk tetap berada pada koridor yang penulis inginkan. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang disusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, dan argumen utama. Selain itu, bab ini diikuti dengan metode penelitian yang mencakup tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II, berisi analisis mengenai kemampuan IPSC selaku lembaga masyarakat sipil dalam memanfaatkan *information politics* dan *symbolic politics* sebagai upaya mobilisasi akar rumput. Pada bagian ini, penulis mengkaji langkah IPSC untuk terhubung dengan publik dan melibatkannya dalam advokasi kebijakan luar negeri Irlandia terkait konflik yang terjadi.

Bab III, berisi pembahasan lanjutan mengenai strategi advokasi yang dilakukan oleh IPSC untuk mendapatkan pengaruh yang lebih luas melalui implementasi *leverage politics* dan *accountability politics*. Bab ini menyoroti kemampuan IPSC dalam mendorong aktor berkuasa dan pemerintah Irlandia untuk bersikap sesuai dengan prinsip yang diperjuangkan serta norma internasional yang berlaku.

Bab IV, bab terakhir penelitian berisi penutup dengan menyajikan kesimpulan dari kajian yang dilakukan, serta kritik dan saran dari penulis sebagai catatan yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian selanjutnya.